

REKONSILIASI MASYARAKAT PASCA KONFLIK (Kasus Masyarakat Poso dan Halmahera Utara)

Syaifullah Cangara
Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Paper ini merupakan intisari dari penelitian yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan Kabupaten Hamahera Utara Provinsi Maluku Utara. Di kedua wilayah itu terjadi "tragedi kemanusiaan" yang membawa korban jiwa baik dari mereka yang beragama Islam maupun mereka yang beragama Nasrani. Penelitian bertujuan untuk : (1) mengetahui penyebab konflik; (2) menganalisis dampak konflik, dan (3) menjelaskan rekonsialisasi dan komitmen masyarakat pasca konflik. Data diperoleh dari tokoh masyarakat dari kedua kelompok yang bertikai, bahkan juga diperoleh dari mereka yang terlibat secara langsung dalam proses konflik tersebut. Penemuan informan dilakukan dengan teknik "snowball" secara serial dengan menggunakan prinsip "triangulasi". Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dan tindak kekerasan awalnya berakar pada pertarungan kepentingan di antara elit politik lokal yang memakai dan memanipulasi simbol-simbol agama, batas wilayah administratif antar etnik dengan basis agama yang berbeda, dan kecemberuan sosial baik antara pendatang dan penduduk asli maupun antar penduduk asli yang berbeda agama. Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal *sintuwu maroso* di Poso dan *hibua lamo* di Halmahera Utara ternyata mampu meng-*akomodasi* potensi konflik menuju integrasi masyarakat di kedua wilayah konflik tersebut.

Kata Kunci: *rekonsiliasi, konflik, elit politik, sintuwu maroso, hibua lamo*

I. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir ini, persoalan yang paling banyak mewarnai kehidupan manusia adalah adanya konflik di berbagai wilayah. Konflik tersebut sering dipandang sebagai konflik yang berbau "sara". Konflik semacam ini sebetulnya bukan dominan Indonesia Sebab dalam beberapa kasus di Asia Tenggara, misalnya, persoalan RAS atau SARA merupakan hal yang nyaris tidak pernah absen alias selalu menjadi bagian dalam konflik sosial yang melibatkan "ras" atau "sara". Negara-negara seperti Filipina, Thailand, India, Pakistan, Afrika, bahkan Eropa, Asutralia dan Amerika merupakan Negara yang memiliki potensi persoalan "sara" hanya saja di sana muncul

politik *multicultural* yang sekarang menjadi kebijakan.

Di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya di wilayah Poso dan Halmahera Utara telah terjadi "tragedi kemanusiaan" sebagai akibat dari proses berlangsungnya konflik sosial di kedua wilayah itu. Banyak kalangan yang tak pernah menduga bahwa di kedua wilayah itu akan pecah konflik. Sebab sejarah perkembangan kehidupan sosial di kedua wilayah itu telah diwarnai dengan kehidupan sosial yang harmonis. Sekalipun di kedua wilayah itu penduduknya terdiri dari etnik yang berbeda dan kepercayaan agama yang berbeda, namun mereka dapat menjalin kehidupan sosial yang harmonis di antara mereka.

Sejarah masyarakat Poso pra-konflik misalnya terkenal dengan sikap keterbukaan mereka menerima para pendatang yang umumnya menganut agama Islam, bahkan raja Poso ketika itu membagikan tanah pemukiman kepada para pendatang. Selain pembauran dalam aspek keagamaan, pembauran juga berlangsung dari aspek etnik. Hal ini ditandai dengan bahasa yg digunakan sehari-hari adalah bahasa *Pamona* yaitu "*bare'e*". Bukan hanya dalam hal bahasa bahkan para pendatang ini sudah menyatakan dirinya adalah orang Poso. Keharmonisan kehidupan sosial dari kelompok yang berbeda agama ini diikat oleh adanya kesadaran kolektif "*Sintuwu Maroso*" yang terbangun dan terwujud dalam saling toleransi dalam perayaan keagamaan baik untuk mereka yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen.

Namun lima puluh tahun setelah pidato Raja Poso meledaklah konflik Poso yang melibatkan dua komunitas besar di sana, yaitu komunitas Islam dan Komunitas Kristen yang meluluhlantakkan keharmonisan kehidupan sosial dari masyarakat Poso yang terdiri dari kelompok agama dan kelompok asli dan pendatang.

Demikian pula masyarakat Halmahera Utara pra-konflik, diwarnai dengan kehidupan sosial yang harmonis. Keharmonisan ini ditandai dengan kesediaan tetua adat dari suku Kao yang mayoritas beragama Kristen memberikan "tanah adat" mereka kepada etnik Makian. Namun ditahun 1999 keharmonisan itu tiba-tiba

berubah menjadi konflik terbuka yang membawa "tragedi kemanusiaan" di wilayah ini.

Adalah menarik secara sosiologis untuk dicermati mengapa kehidupan sosial yang terjalin secara harmonis di kedua wilayah itu, tiba-tiba berubah menjadi konflik, dampak apa saja yang ditimbulkannya dan yang paling menarik untuk dicermati adalah bagaimana proses rekonsiliasi di kedua komunitas yang berkonflik itu dapat berlangsung.

II. Akar Konflik Poso dan Halmahera Utara

Faktor penyebab konflik Poso dan Halmahera secara sosiologis merupakan sebuah piramida bertingkat. Pada tingkat paling dasar terdapat dua transformasi utama yang telah mengubah wilayah Poso secara fundamental. Pada lapisan tingkat berikutnya di lapisan tengah beroperasi sejumlah faktor kesukuan dan keagamaan yang berkaitan dengan faktor-faktor politik. Kemudian pada puncak piramida ditemukan faktor-faktor penyulut konflik atau provokator serta *stereotype-stereotype labelling* psikologi sosial dan dendam yang semakin menguat seiring dengan berkepanjangannya kekerasan.

Dalam analisis piramida di tingkat dasar ditemukan adanya perubahan ditingkat demografis yaitu terjadinya migrasi ke wilayah Poso maupun Halmahera Utara. Masuknya migran dari Gorontalo dan Bugis yang umumnya beragama Islam di Poso, masuknya suku Makkian ke wilayah Maliput di Halmahera menyebabkan terjadinya perubahan komposisi

masyarakat di kedua wilayah tersebut. Perubahan komposisi terutama terjadi pada jumlah warga yang beragama Islam semakin mengimbangi jumlah penduduk asli yang beragama Kristen.

Perubahan komposisi keagamaan, status demografis, merupakan potensi konflik yang besar. Agama pada dasarnya memiliki faktor integrasi dan disitegrasi. Faktor integrasi, antara lain, agama mengajarkan persaudaraan atas dasar iman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Agama mengajarkan kedamaian dan kerukunan di antara manusia dan sesama makhluk. Agama mengajarkan budi pekerti yang luhur, hidup tertib, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ajaran yang disebutkan itu bersifat universal. Selain itu, terdapat ajaran agama yang juga bisa menimbulkan disintegrasi bila dipahami secara sempit dan kaku. Di antaranya, setiap pemeluk agama meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah jalan hidup yang paling benar, sehingga dapat menimbulkan prasangka negatif atau sikap memandang rendah pemeluk agama lain. Secara internal, teks-teks keagamaan dalam satu agama juga terbuka terhadap aneka penafsiran yang dapat menimbulkan aliran dan kelompok keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan satu sama lain sehingga memicu konflik.

Para pendatang dalam perkembangannya memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi perdagangan mengambil alih peran ekonomi pertanian. Sektor perdagangan

yang berpusat di wilayah kota lebih banyak dikuasai oleh pedagang yang beragama Islam. Kenyataan ini makin memperkuat sentimen keterdesakan penduduk asli yang berbasis pertanian dan beragama Kristen.

Kedua perubahan di atas menempatkan kedua umat beragama di Poso dan di Halmahera Utara berhadap-hadapan secara langsung dan mempengaruhi penyebab yang ada di lapisan tengah piramida. Transformasi struktural masuk dalam kesadaran kolektif masing-masing umat beragama. Pada saat inilah para warga setiap umat itu mulai bertarung. Stereotipe dengan pengelompokan "mereka" dan "kita" semakin menguat. Kondisi ini semakin diperparah dan dimanfaatkan oleh elite politik lokal di dalam perbagai perebutan kekuasaan lewat pilkada.

Di lapisan puncak piramida terjadi penyulut yaitu terjadinya perkelahian antar pemuda. Peristiwa kriminal biasa inilah yang menjadi pemicu meletupkan ketegangan dan potensi konflik yang sudah mengendap lama dan akhirnya melahirkan tragedi kemanusiaan di wilayah itu.

III. Rekonsiliasi Pasca Konflik

Tragedi kemanusiaan di kedua wilayah ini pada akhirnya diupayakan untuk dihemtikan. Di wilayah Poso atas prakarsa Yusuf Kalla dilakukan "perdamaian Malino". Sedangkan di Halmahera Utara diupayakan lewat pemekaran wilayah. Dalam kenyataannya upaya perdamaian seperti tidak menciptakan suasana damai dari

kedua kounitas yang berkonflik. Di Poso misalnya malahan tindak kekerasan semakin mirip dengan terorisme dan semakin menjadi-jadi. Munculnya tindak kekerasan pasca Perdamaian Malino oleh banyak kalangan dinilai sebagai berbeda dengan konflik sebelum Malino.

Menurut Penulis permasalahan tindak kekerasan pasca Malino terutama disebabkan oleh dua hal utama, yaitu : *Pertama*, adanya tuntutan atau permasalahan perorangan (*personal grivances*) yang disebabkan oleh rasa dendam, trauma psikologis, dan faktor kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi. Rasa dendam terutama warga Muslim Poso yang menjadi korban pada konflik yang mengalami getirnya peristiwa seperti keluarga dibantai, rumah dibakat, dan sebagainya. Trauma psikologi terutama dialami oleh mereka yang secara langsung melihat pembantaian yang menimpa keluarganya. *Kedua*, adanya tuntutan kolektif yang membuat individu-individu secara kolektif memiliki tanggung jawab terhadap komunitasnya (*public outrage*). Sejumlah warga Islam menghendaki agar sejumlah kasus kekerasan yang terjadi dimasa konflik, terutama kasus pembantaian diproses dengan menangkap pelakunya dan disidangkan. Sementara itu pihak penegak hukum berpendapat bahwa proses hukum untuk kasus-kasus tersebut sulit dilakukan karena disamping masalah teknis untuk mencari alat bukti mengingat kasusnya sudah lama dan dilakukan secara massal juga karena kekuatiran akan membuat warga Nasrani juga mengajukan tuntutan yang sama terhadap

kasus-kasus kekerasan massal yang dialami warga nasrani. Dengan demikian tujuan proses hukum untuk menjamin rasa keadilan akan sulit dicapai.

Kondisi *public outrage* ini lebih diperkuat lagi dengan masuknya kelompok-kelompok radikal dari luar ke daerah Poso. Kelompok luar ini membawa ideologi jihad yang melegalkan tindakan kekerasan dalam menegakkan kebenaran sesuai dengan pandangannya. Para pendatang dari luar ini juga memberikan dukungan tidak hanya dakwah, namun juga turut berjuang secara langsung, memberi bantuan logistik, baik dalam bentuk persenjataan, makanan, maupun obat-obatan.

Gabungan kedua hal tersebut di ataslah yang menyebabkan terjadinya proses radikalisasi di kalangan masyarakat terutama kalangan pemuda Poso. Rasa dendam dan trauma psikis yang mulanya bersifat individual berubah menjadi tuntutan kolektif ketika distimulasi oleh ideologi radikal yang melegalisasi aksi kekerasan dan balas dendam, maka terjadilah aksi-aksi kekerasan bernuansa terorisme yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam kasus Halmahera Utara, ternyata pemekaran wilayah juga tidak mampu untuk meredakan konflik di kedua komunitas yang bertikai, malahan semakin memperluas konflik itu sendiri. Hingga saat ini masih terdapat dua konflik pemekaran wilayah. *Pertama*, konflik antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Halmahera Barat yang melibatkan wilayah enam desa sengketa, yaitu Desa Pasir Putih, Desa

Bobane Igo, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Akusahu, dan Desa Dum-Dum. *Kedua*, adalah penetapan Sofifi sebagai kota yang terletak di pulau Tidore.

Ternyata usaha menghentikan konflik lewat prakarsa pihak ketiga (kasus Poso) dan lewat pemekaran wilayah (kasus Halmahera Utara) tidak efektif dalam penyelesaian konflik. Karen itu diperlukan adanya upaya lain untuk merekonsiliasi dengan tujuan terwujudnya *civilisation* di kekedua komunitas yang berkonflik. Atas prakarsa sendiri kedua komunitas yang berkonflik melirik ke modal sosial lokal dan kearifan lokal yang mereka miliki untuk dijadikan pijakan dalam menghentikan konflik dan menjalin kehidupan bersama yang harmonis seperti kehidupan sosial mereka pasca konflik.

Secara teroris dapat dikatakan bahwa konflik dan integrasi adalah bagaikan dua sisi mata uang yang akan senantiasa ada di dalam kehidupan masyarakat. Identifikasi faktor-faktor kesamaan dan mengembangkannya sebagai milik bersama akan efektif untuk mengurangi bahkan menghentikan konflik itu sama sekali. Di sinilah letak urgensi dari nilai-nilai kearifan lokal yang mereka miliki untuk diangkat dan dijadikan simbol-simbol sebagai milik bersama.

Di Poso, misalnya keinginan masyarakat untuk merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai pemersatu lahir dari upaya inisiatif warga masyarakat lokal sendiri. Salah satu bentuk dari upaya itu adalah terbentuknya

Forum "*Siwagilemba*", Forum ini dimaksudkan untuk memayungi kedua komunitas tersebut untuk mendorong terciptanya perdamaian sejati di wilayah ini. Pemilihan nama forum ini mengandung makna filosofi, yaitu *Siwagi* berarti penopang, sedangkan kata *lembah* mengartikan wilayah Poso yang didiami siapa saja yang tinggal, hidup, mencari, dan mati di Poso.

Kesadaran kolektif untuk mencari persamaan dari kedua kelompok menemukan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bersama perlu dilakukan penguatan terutama untuk mencegah dan meminimalisir munculnya benih-benih konflik. Kearifan lokal "*sintuwu maroso*" adalah perekat budaya yang paling efektif untuk menyatukan masyarakat lokal dengan pendatang dalam suatu komunitas Poso. Hanya saja seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin terbuka membawa dampak terhadap semakin mudarnya nilai-nilai kearifan lokal tersebut.

Sesungguhnya hakekat yang terkandung dalam kearifan lokal *sintuwu maroso* telah berurat berakar dalam komunitas masyarakat Poso bahkan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah merupakan kepribadian masyarakat di daerah ini. Saling memberi dan menerima baik dalam bentuk materi, tenaga dan dukungan moril yang semuanya dilakukan secara spontanitas dan tanpa pamrih.

Budaya adat *sintuwu maroso* sebagai kearifan lokal sangat besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat Poso. Ia sebagai pedoman berperilaku baik dalam tingkatan

individu, kelompok maupun komunitas tanpa memandang latar agama. Nilai *sintuwu maroso* dapat juga dimanfaatkan sebagai modal sosial (*social capital*) karena memuat prinsip gotong royong, solidaritas sosial, kebersamaan, etika, kepatuhan dan kepanutan. Kesemuanya ini merupakan modal untuk terciptanya *social order* dalam masyarakat.

Revitalisasi nilai budaya ini perlu diupayakan lewat adanya komitmen dan kesungguhan dari masyarakat pemilik nilai budaya ini untuk memelihara, mengembangkan, dan menerapkannya dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Dalam kasus rekonsiliasi masyarakat Halmahera Utara pasca konflik memperlihatkan bekerjanya nilai-nilai kearifan lokal dari masyarakat di wilayah ini. Terciptanya forum bersama dari warga masyarakat "Forum Kerukunan dan Komunikasi Antar Umat Beragama" bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Bahkan menurut beberapa kalangan telah dilakukan sumpah "sakral" tentang perdamaian di wilayah ini. "*Siapa yang memulai pertikaian, kalau ke hutan akan diterkam harimau dan kalau ke laut akan ditelan buaya*"

Nilai kearifan lokal "*hibualamo*" memegang peran penting dalam mengintegrasikan masyarakat yang terlibat dalam konflik. Nilai budaya ini mampu menjembatani pengelompokan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda. *Hibualamo* yang mengandung makna sebagai "*rumah besar*" yang merupakan lambang

bahwa mereka berasal dari satu rumpung keluarga, sehingga perbedaan yang ada direkatkan dengan adat *hibualamo*.

Menurut Ketua MUI Halmahera Utara memang dalam kondisi konflik yang membawa sentimen agama di Halmahera Utara, maka unsur budaya yang menjadi lebih efektif untuk diangkat sebagai alat pemersatu ketimbang dengan mengangkat dalil-dalil keagamaan yang memiliki potensi mempertajam perbedaan di kedua penganut agama yang berkonflik di wilayah ini.

IV. Kesimpulan

1. Konflik Poso dan konflik Halmahera Utara, dapat dianalisis dengan menggunakan piramida atau analisis gunung es. Dimana pada dasar piramida terjadi transformasi struktural dari masyarakat yang disebabkan oleh proses migrasi, perebutan sumber daya, dan perubahan struktur masyarakat yang berbasis agama. Pada lapisan tengah dari piramida itu adalah adanya perebutan kekuatan politik yang diaktori oleh elit lokal yang mengatasnamakan agama. Sedang puncak piramida adalah adanya peristiwa pidana ringan yang dimaknai dan dipolitisasi sebagai pewujudan stigma dari kedua kelompok yang memang telah berada pada tingkat persaingan.
2. Upaya perdamaian yang melibatkan masuknya pihak luar, ternyata tidak efektif untuk mengakhiri konflik, malahan mengubah konflik menjadi tindak kekerasan

yang berciri teror dengan pembenaran lewat dalil-dalil keagamaan yang ditafsirkan secara dangkal dan fanatik.

3. Upaya yang tumbuh dari warga komunitas yang terlibat dalam membuat resolusi konflik ternyata lebih efektif, terutama bila nilai-nilai kearifan lokal dan budaya leluhur yang merupakan "milik bersama" dari kelompok yang bertikai akan mampu mengalahkan potensi perbedaan baik yang bernuansa keagamaan maupun kepemilikan sumberdaya.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 2002. *Konflik Baru antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme dan Pluralisme*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Tamagola, A.Tamrin, dkk. 2007, *Revitalisasi Kearifan Lokal. Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Internasional Centre For Islam and Pluralism (ICIP) Jakarta.
- Liliweri, M.S, Alo. 2001. *Gatra-gatra Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuly Qodir dan Tunjung Sulaksono. 2012. *Politik Rente dan Konflik di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara*. Working Paper No.002/JKSG/